

MENGANALISIS KERJA SAMA INDONESIA DAN MALAYSIA DALAM PENGELOLAAN WILAYAH PERBATASAN DI PULAU KALIMANTAN

Aditiawangsa Tadore Alauddin¹, Siti Fitrah Ramadania², Mohamad Ikbalkadir³

Fakultas Pemerintahan dan Sektor Publik, Universitas Bina Mandiri Gorontalo, Indonesia

Email: adityatadore73@gmail.com, sitifitra01@gmail.com, mohamadikbalkadir@yahoo.ac.id

Abstract

Article History:

Received: 02/06/2026

Revised: 10/07/2026

Accepted: 07/08/2026

Published: 30/09/2026

Keywords:

bilateral collaboration,
border management,
Kalimantan, Indonesia-
Malaysia, Sosek Malindo.

The border region between Indonesia and Malaysia in Kalimantan is an important area facing various complex issues, ranging from unequal development and cross-border illegal activities to the welfare concerns of local communities. This study aims to analyze the forms of cooperation between the two countries in managing the border region in Kalimantan, with attention to the mechanisms used, the challenges encountered, and their impact on the people living in the border areas. The method applied in this study is descriptive qualitative research using a literature review approach. The findings show that cooperation between the two countries is carried out through several main mechanisms: (1) integrated patrols conducted by the Indonesian National Armed Forces (TNI) and the Malaysian Army (TDM) through the Border Security Task Force (Satgas Pamtas); (2) the exchange of strategic intelligence information within the framework of the General Border Committee (GBC); (3) Malaysia-Indonesia Socioeconomic Cooperation (Sosek Malindo) for regional development; and (4) the signing of Memorandums of Understanding (MoUs) in the fields of defense and security. Although this cooperation has shown positive results, several obstacles remain, such as differences in standard operating procedures, inadequate infrastructure, and economic disparities that must be addressed continuously.

Abstrak

Wilayah perbatasan antara Indonesia dan Malaysia di Kalimantan adalah daerah penting yang menghadapi berbagai masalah rumit, mulai dari ketidakmerataan pembangunan, aktivitas ilegal yang melintas batas, hingga isu kesejahteraan masyarakat setempat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk kerjasama antar kedua negara dalam pengelolaan wilayah perbatasan di Kalimantan, dengan memperhatikan mekanisme yang digunakan, tantangan yang dihadapi, serta dampaknya terhadap masyarakat yang tinggal di perbatasan. Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan studi pustaka. Temuan dari penelitian menunjukkan bahwa kerjasama antara kedua negara ini dilakukan melalui beberapa mekanisme utama: (1) Patroli terintegrasi oleh TNI dan Tentara Darat Malaysia (TDM) melalui Satgas Pamtas; (2) Pertukaran informasi intelijen strategis dalam kerangka General Border Committee (GBC); (3) Kerjasama Sosial Ekonomi Malaysia-Indonesia (Sosek Malindo) untuk pengembangan kawasan; (4) Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) di bidang pertahanan dan keamanan; (5) Pemanfaatan teknologi pengawasan teknologi. Meskipun kerjasama ini menunjukkan hasil yang positif, masih terdapat sejumlah kendala seperti perbedaan prosedur operasi standar, kurangnya infrastruktur, dan kesenjangan ekonomi yang harus diatasi secara berkelanjutan.

Kata Kunci:

kolaborasi bilateral,
pengelolaan perbatasan,
Kalimantan, Indonesia-
Malaysia, Sosek Malindo

PENDAHULUAN

Wilayah perbatasan memiliki posisi strategis dalam penyelenggaraan negara karena berkaitan dengan kedaulatan, keamanan nasional, hubungan

antarnegara, serta pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat. Perbatasan tidak hanya berfungsi sebagai batas yurisdiksi, tetapi juga menjadi ruang interaksi sosial, budaya, dan

ekonomi masyarakat yang hidup di sekitar wilayah dua negara. Dalam konteks Indonesia, perbatasan darat Indonesia–Malaysia di Pulau Kalimantan merupakan salah satu kawasan strategis yang mempertemukan kepentingan keamanan, diplomasi, pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat. Kompleksitas tersebut terlihat pada kawasan perbatasan Kalimantan Utara yang menghadapi persoalan politik, keamanan, dan sosial ekonomi serta membutuhkan interaksi kedua negara dalam pengelolaannya (Anandra & Kusumawardhana, 2023).

Persoalan pengelolaan perbatasan semakin kompleks karena kawasan ini menghadapi berbagai ancaman keamanan nontradisional. Penyelundupan, perdagangan manusia, penyeberangan ilegal, serta kejahatan lintas negara menjadi bagian dari persoalan yang membutuhkan pendekatan kolaboratif antara Indonesia dan Malaysia (Setiawan, 2025; Nusantara et al., 2022). Dalam dimensi ketenagakerjaan, hubungan bilateral kedua negara juga menghadapi persoalan tata kelola dan perlindungan pekerja migran Indonesia. Respons Indonesia terhadap penerapan Online Maid System oleh Malaysia menunjukkan bahwa tata kelola mobilitas pekerja lintas negara tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi, tetapi juga perlindungan hak pekerja dan kebijakan luar negeri kedua negara (Nidatya et al., 2023). Penanganan pekerja migran ilegal di kawasan perbatasan juga membutuhkan tata kelola kooperatif yang melibatkan berbagai institusi karena memiliki implikasi terhadap ketahanan wilayah perbatasan (Anggita et al., 2024). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan perbatasan tidak dapat hanya mengandalkan pendekatan keamanan teritorial, tetapi membutuhkan koordinasi kebijakan dan kelembagaan yang mampu merespons berbagai persoalan lintas negara.

Di sisi lain, kawasan perbatasan merupakan ruang pembangunan yang memiliki potensi sosial dan ekonomi. Pengelolaan kawasan perbatasan karena itu perlu mengintegrasikan aspek keamanan dengan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Strategi pembangunan membutuhkan optimalisasi program pemerintah, identifikasi kebutuhan masyarakat, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pemberdayaan potensi ekonomi lokal (Imbran et al., 2020). Dalam konteks perbatasan Kalimantan, pendekatan pembangunan lintas negara telah diwujudkan melalui Kerja Sama Sosial Ekonomi Malaysia–Indonesia (Sosek Malindo). Kerja sama

tersebut menjadi salah satu strategi lintas batas yang berkontribusi terhadap pembangunan kawasan perbatasan Kalimantan melalui hubungan Indonesia dengan Malaysia Timur, khususnya Sarawak dan Sabah (Hariyatie, 2015).

Pengelolaan kawasan perbatasan juga membutuhkan tata kelola yang mampu menghubungkan kebijakan kedua negara dengan dinamika masyarakat lokal. Kajian Anuar dan Raharjo (2022) pada kawasan Entikong–Tebedu menunjukkan bahwa cross-border governance menghadapi tantangan koordinasi dan adaptasi yang memengaruhi proses integrasi kawasan perbatasan. Di sisi lain, hubungan lintas batas tidak hanya dibentuk oleh otoritas negara, tetapi juga oleh interaksi dan pemaknaan masyarakat yang hidup di kawasan tersebut (Abdullah et al., 2022). Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan perbatasan perlu dipahami sebagai proses yang melibatkan negara, kelembagaan, dan masyarakat secara bersamaan.

Kompleksitas keamanan dan pembangunan tersebut mendorong Indonesia dan Malaysia membangun berbagai mekanisme kerja sama bilateral. Salah satu bentuknya adalah diplomasi perbatasan yang dilakukan secara terinstitusionalisasi untuk menangani persoalan sesuai bidang isu yang dihadapi kedua negara. Dalam konteks Nunukan–Sabah, institusionalisasi tersebut menjadi sarana bagi Indonesia dan Malaysia untuk bersinergi dalam mengelola persoalan perbatasan (Anandra & Kusumawardhana, 2023). Pada dimensi keamanan, kerja sama juga dilaksanakan melalui patroli terkoordinasi antara Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Tentara Darat Malaysia (TDM) di kawasan perbatasan Kalimantan Barat. Mekanisme tersebut menunjukkan pentingnya kerja sama bilateral dalam menghadapi ancaman keamanan nontradisional dan menjaga stabilitas wilayah perbatasan (Setiawan, 2025). Sementara itu, kapasitas pemerintah daerah juga menjadi bagian penting dalam tata kelola perbatasan karena implementasi kebijakan pada tingkat lokal membutuhkan kemampuan kelembagaan untuk menerjemahkan kebijakan nasional dan kerja sama bilateral ke dalam pengelolaan kawasan. Kajian Prabowo et al. (2022) di Pulau Sebatik menunjukkan pentingnya pengembangan kapasitas pemerintah daerah dalam pengelolaan kawasan perbatasan Indonesia–Malaysia.

Perkembangan teknologi juga memberikan peluang bagi penguatan pengawasan dan tata kelola kawasan perbatasan. Pemanfaatan pesawat

terbang tanpa awak (Unmanned Aerial Vehicle/UAV) telah dikaji dalam konteks pengamanan perbatasan Kalimantan dan menunjukkan manfaat dalam mendukung pengintaian serta pengumpulan informasi pada wilayah yang memiliki keterbatasan akses (Anwar, 2021). Namun, pemanfaatan teknologi tidak dapat dilepaskan dari kapasitas tata kelola. Transformasi digital tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan infrastruktur teknologi, tetapi juga membutuhkan kebijakan yang adaptif, kesiapan kelembagaan, manajemen perubahan, serta kolaborasi multipemangku kepentingan (Suprpto & Baderan, 2026). Dengan demikian, perkembangan teknologi dalam pengelolaan perbatasan perlu ditempatkan sebagai bagian dari penguatan tata kelola dan koordinasi kelembagaan, bukan semata-mata sebagai instrumen teknis pengawasan.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah memberikan dasar penting untuk memahami pengelolaan perbatasan Indonesia–Malaysia. Anandra dan Kusumawardhana (2023) menekankan diplomasi dan institusionalisasi interaksi Indonesia–Malaysia, sedangkan Setiawan (2025) memusatkan perhatian pada patroli terkoordinasi TNI–TDM. Anuar dan Raharjo (2022) mengkaji cross-border governance pada kawasan Entikong–Tebedu, sementara Abdullah et al. (2022) memperlihatkan dinamika relasi otoritas negara dan masyarakat di kawasan perbatasan Kalimantan. Dari perspektif kelembagaan domestik, Prabowo et al. (2022) menempatkan kapasitas pemerintah daerah sebagai aspek penting dalam pengelolaan kawasan perbatasan Indonesia–Malaysia di Pulau Sebatik. Kajian lainnya menyoroti pembangunan melalui Sosek Malindo (Hariyatie, 2015), kejahatan lintas negara (Nusantoro et al., 2022), pekerja migran (Nidatya et al., 2023; Anggita et al., 2024), serta pemanfaatan UAV dalam mendukung pengamanan wilayah perbatasan (Anwar, 2021). Keragaman kajian tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan perbatasan Indonesia–Malaysia telah berkembang sebagai bidang kajian yang mencakup dimensi diplomasi, keamanan, kelembagaan, pembangunan sosial ekonomi, mobilitas masyarakat, dan teknologi.

Meskipun berbagai penelitian tersebut telah memperluas pemahaman mengenai pengelolaan perbatasan, perhatian yang diberikan masih menunjukkan perbedaan fokus pada aspek diplomasi, keamanan, kelembagaan, pembangunan, mobilitas masyarakat, dan

teknologi. Ruang kajian masih terbuka untuk mengintegrasikan berbagai mekanisme tersebut guna melihat keterhubungan antara keamanan, koordinasi bilateral, kapasitas kelembagaan, pembangunan sosial ekonomi, dan perkembangan teknologi dalam pengelolaan perbatasan Kalimantan. Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya mengintegrasikan dimensi-dimensi tersebut dalam satu analisis mengenai kerja sama Indonesia–Malaysia dalam pengelolaan wilayah perbatasan Kalimantan. Dengan perspektif tersebut, pengelolaan perbatasan dipahami tidak hanya sebagai upaya menjaga kedaulatan dan keamanan wilayah, tetapi juga sebagai proses tata kelola lintas negara yang berkaitan dengan kapasitas kelembagaan, pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian diarahkan untuk menjawab permasalahan mengenai bagaimana bentuk dan dinamika kerja sama Indonesia dan Malaysia dalam pengelolaan wilayah perbatasan di Pulau Kalimantan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kerja sama Indonesia–Malaysia dalam pengelolaan wilayah perbatasan Kalimantan dengan mengidentifikasi mekanisme kerja sama, tantangan implementasi, serta kontribusinya terhadap penguatan keamanan dan pembangunan sosial ekonomi kawasan perbatasan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur (literature review) untuk menganalisis kerja sama Indonesia dan Malaysia dalam pengelolaan wilayah perbatasan di Pulau Kalimantan. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memperoleh pemahaman terhadap suatu fenomena dengan memperhatikan konteks dan kompleksitas permasalahan yang dikaji (Creswell, 2014). Dalam penelitian ini, studi literatur diarahkan untuk mengidentifikasi dan menginterpretasikan berbagai informasi mengenai bentuk kerja sama, dinamika implementasi, serta persoalan dalam pengelolaan perbatasan Indonesia–Malaysia.

Data penelitian menggunakan data sekunder yang bersumber dari artikel jurnal ilmiah, buku, laporan penelitian, dokumen pemerintah, peraturan, dan dokumen resmi yang berkaitan dengan pengelolaan perbatasan Indonesia–Malaysia. Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur berdasarkan beberapa tema utama, yaitu kerja sama bilateral Indonesia–Malaysia, keamanan perbatasan, patroli

terkoordinasi, diplomasi dan kelembagaan perbatasan, pembangunan sosial ekonomi, Sosek Malindo, mobilitas lintas batas, serta perkembangan teknologi dalam tata kelola perbatasan. Literatur dipilih dengan mempertimbangkan relevansi substansi, kredibilitas sumber, keterkaitan dengan wilayah perbatasan Kalimantan, dan kebaruan publikasi. Literatur yang lebih lama tetap digunakan apabila memiliki relevansi historis atau diperlukan untuk menjelaskan perkembangan kerja sama perbatasan.

Analisis dilakukan secara kualitatif dengan mengadaptasi tahapan analisis data Miles, Huberman, dan Saldaña (2020), yang meliputi kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Pada tahap kondensasi, informasi yang diperoleh dari berbagai literatur dan dokumen diseleksi berdasarkan relevansinya dengan fokus penelitian. Informasi yang telah diseleksi kemudian dikategorikan ke dalam tema keamanan perbatasan, koordinasi bilateral, pembangunan sosial ekonomi, kelembagaan, dan perkembangan tata kelola berbasis teknologi. Selanjutnya, informasi antarsumber dibandingkan untuk mengidentifikasi pola, persamaan, perbedaan, serta perkembangan kerja sama Indonesia–Malaysia. Hasil pengelompokan dan perbandingan tersebut diinterpretasikan untuk memperoleh pemahaman yang terintegrasi mengenai pengelolaan wilayah perbatasan Kalimantan.

Keabsahan informasi dilakukan melalui triangulasi sumber dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai literatur ilmiah dan dokumen resmi yang relevan. Proses tersebut dilakukan untuk memastikan konsistensi informasi yang digunakan dalam analisis. Hasil analisis selanjutnya disajikan secara deskriptif-analitis untuk menjelaskan bentuk kerja sama, tantangan implementasi, serta kontribusi kerja sama Indonesia–Malaysia dalam pengelolaan wilayah perbatasan Kalimantan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil kajian menunjukkan bahwa kerja sama Indonesia dan Malaysia dalam pengelolaan wilayah perbatasan Kalimantan berkembang melalui beberapa mekanisme yang saling berkaitan. Kerja sama tersebut tidak hanya berorientasi pada pengamanan wilayah, tetapi juga mencakup koordinasi kelembagaan, pembangunan sosial ekonomi, diplomasi perbatasan, serta penguatan kapasitas tata kelola.

Pola tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan perbatasan Indonesia–Malaysia berkembang menjadi tata kelola lintas negara yang melibatkan berbagai institusi, tingkatan pemerintahan, dan bidang kerja sama.

Kerja Sama Pengamanan Perbatasan

Pengamanan merupakan salah satu dimensi utama kerja sama Indonesia–Malaysia di wilayah perbatasan Kalimantan. Salah satu mekanisme yang dilaksanakan adalah patroli terkoordinasi antara Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Tentera Darat Malaysia (TDM). Patroli tersebut menjadi instrumen kerja sama bilateral dalam menghadapi karakteristik wilayah perbatasan yang rentan terhadap ancaman keamanan nontradisional seperti penyelundupan, perdagangan manusia, dan penyeberangan ilegal. Penelitian Setiawan (2025) menunjukkan bahwa patroli terkoordinasi TNI–TDM di Kalimantan Barat selama 2023–2024 merupakan bentuk kolaborasi lintas batas yang diarahkan untuk menjaga stabilitas wilayah perbatasan. Pasted markdown

Keberadaan patroli terkoordinasi memperlihatkan bahwa keamanan perbatasan tidak dapat dilaksanakan secara unilateral. Selain penyeberangan ilegal dan penyelundupan, kawasan perbatasan Indonesia–Malaysia juga menghadapi kejahatan lintas negara yang membutuhkan koordinasi aparat dan institusi kedua negara (Nusantoro et al., 2022). Mobilitas orang dan barang serta karakteristik geografis kawasan membuat tindakan pengamanan satu negara berkaitan dengan tindakan negara di sisi perbatasan lainnya. Kondisi tersebut memperkuat temuan Setiawan (2025) mengenai pentingnya patroli terkoordinasi TNI–TDM dan sejalan dengan Anandra dan Kusumawardhana (2023) yang menunjukkan bahwa persoalan politik, keamanan, dan sosial ekonomi mendorong kedua negara membangun interaksi dan diplomasi perbatasan secara terinstitusionalisasi.

Dengan demikian, patroli terkoordinasi tidak hanya dapat dipahami sebagai kegiatan teknis pengamanan, tetapi juga merepresentasikan praktik kerja sama pertahanan yang memungkinkan aparat kedua negara membangun komunikasi dan koordinasi dalam merespons persoalan lintas batas. Efektivitas kerja sama tersebut lebih tepat dilihat dari keberlangsungan mekanisme koordinasi dan kontribusinya terhadap stabilitas perbatasan. Pernyataan kuantitatif mengenai persentase penurunan aktivitas ilegal tidak digunakan karena belum

ditemukan sumber terverifikasi yang cukup kuat untuk mendukung klaim tersebut.

Koordinasi Kelembagaan melalui GBC Malindo

Kerja sama pengelolaan perbatasan juga ditopang oleh mekanisme kelembagaan melalui General Border Committee Malaysia–Indonesia (GBC Malindo). GBC menjadi salah satu forum bilateral yang memfasilitasi dialog Indonesia dan Malaysia dalam membahas kerja sama di wilayah perbatasan. Forum tersebut digunakan untuk mengevaluasi perkembangan kerja sama pada badan-badan di bawahnya, baik pada bidang operasi maupun nonoperasi.

Perkembangan GBC menunjukkan bahwa pengelolaan perbatasan memerlukan koordinasi lintas institusi. Kerja sama tersebut tidak hanya melibatkan institusi pertahanan, tetapi juga berbagai instansi yang berkaitan dengan urusan luar negeri, pemerintahan dalam negeri, hukum, keamanan, pencarian dan pertolongan, serta intelijen. Struktur tersebut memperlihatkan karakter multidimensional pengelolaan perbatasan karena persoalan lintas batas tidak dapat diselesaikan oleh satu institusi saja. Naskah awal juga menunjukkan bahwa mekanisme GBC mempunyai implikasi operasional melalui koordinasi dan pengelolaan pos perbatasan.

Pasted markdown

Pada pertemuan GBC Malindo ke-43 tahun 2023, Indonesia dan Malaysia mengaktifkan kembali 14 pos jaga bersama yang terdiri atas tujuh pos di Indonesia dan tujuh pos di Malaysia pada kawasan perbatasan Kalimantan. Pengaktifan kembali pos tersebut menunjukkan bahwa koordinasi kelembagaan dalam kerangka GBC memiliki implikasi operasional bagi pengelolaan keamanan di lapangan.

Meskipun demikian, keberadaan kelembagaan formal tidak dengan sendirinya menghilangkan seluruh persoalan implementasi. Efektivitas kelembagaan bilateral tidak hanya ditentukan oleh keberadaan forum dan kesepakatan, tetapi juga kemampuan kedua negara menerjemahkan kesepakatan tersebut menjadi tindakan yang konsisten pada tingkat operasional. Dengan demikian, kesinambungan koordinasi, kejelasan kewenangan, dan tindak lanjut kesepakatan menjadi faktor penting dalam penguatan GBC Malindo.

Sosek Malindo dan Pembangunan Kawasan Perbatasan

Dimensi lain yang penting dalam pengelolaan perbatasan adalah pembangunan sosial ekonomi.

Indonesia dan Malaysia mengembangkan Kerja Sama Sosial Ekonomi Malaysia–Indonesia (Sosek Malindo) sebagai wadah pembangunan kawasan perbatasan. Sosek Malindo diarahkan pada peningkatan taraf hidup masyarakat wilayah perbatasan dan pengembangan kerja sama yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat kedua negara. Orientasi tersebut memperlihatkan bahwa pengelolaan perbatasan tidak hanya menyangkut pengamanan wilayah, tetapi juga kondisi sosial ekonomi masyarakat. Pasted markdown

Namun, pembangunan lintas batas tidak hanya ditentukan oleh keberadaan forum kerja sama. Studi Anuar dan Raharjo (2022) pada Entikong–Tebedu memperlihatkan bahwa cross-border governance juga dipengaruhi oleh kemampuan institusi kedua negara untuk beradaptasi dan berkoordinasi dalam menghadapi perubahan lingkungan perbatasan. Hubungan lintas batas bahkan tidak sepenuhnya dapat dipahami hanya melalui perspektif negara karena masyarakat lokal memiliki pengalaman dan konstruksi hubungan tersendiri dalam kehidupan sehari-hari di kawasan perbatasan (Abdullah et al., 2022). Hal tersebut menunjukkan bahwa efektivitas pembangunan kawasan membutuhkan keterhubungan antara kerja sama antarpemerintah dengan dinamika masyarakat perbatasan.

Relevansi Sosek Malindo masih terlihat dalam perkembangan mutakhir. Pada tahun 2024, pertemuan Sosek Malindo tetap dilaksanakan antara Kalimantan Barat dan Sarawak. Sidang ke-37 JKK/KK Sosek Malindo melibatkan delegasi kedua wilayah, sedangkan kegiatan lain dalam kerangka Sosek Malindo juga berlangsung di kawasan PLBN Entikong. Keberlanjutan tersebut menunjukkan bahwa Sosek Malindo bukan hanya mekanisme historis, tetapi masih menjadi wadah interaksi lintas batas Indonesia–Malaysia. Pasted markdown

Temuan tersebut juga memperkuat pandangan bahwa pembangunan kawasan perbatasan membutuhkan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat. Dalam konteks pembangunan masyarakat, Imbran et al. (2020) menekankan pentingnya optimalisasi program pemerintah, identifikasi kebutuhan masyarakat, peningkatan sumber daya manusia, dan pemberdayaan potensi ekonomi lokal. Meskipun penelitian tersebut tidak dilakukan di kawasan perbatasan Kalimantan, prinsip pemberdayaan tersebut memberikan perspektif bahwa pembangunan perbatasan perlu menempatkan masyarakat sebagai bagian dari proses

pembangunan, bukan hanya sebagai objek kebijakan.

Diplomasi dan Tata Kelola Perbatasan

Hasil kajian selanjutnya menunjukkan bahwa hubungan Indonesia–Malaysia di kawasan perbatasan tidak dapat dilepaskan dari diplomasi. Perbedaan yurisdiksi, kepentingan nasional, serta karakter persoalan lintas batas membutuhkan ruang komunikasi yang memungkinkan kedua negara mengelola permasalahan tanpa mengandalkan tindakan sepihak. Anandra dan Kusumawardhana (2023) menunjukkan bahwa diplomasi perbatasan Indonesia terhadap Malaysia dilaksanakan melalui proses institusionalisasi dengan fokus pembahasan berdasarkan bidang persoalan yang dihadapi. Dalam konteks Nunukan–Sabah, mekanisme tersebut memungkinkan Indonesia dan Malaysia bersinergi dalam pengelolaan persoalan perbatasan.

Temuan tersebut diperkuat oleh Purnama dan Iswardhana (2022), yang menunjukkan bahwa diplomasi perbatasan Indonesia terhadap Malaysia pada periode 2014–2020 melibatkan mekanisme seperti Sosek Malindo dan forum bilateral lainnya untuk merespons sengketa batas dan persoalan sosial di kawasan perbatasan. Dengan demikian, diplomasi perbatasan memiliki fungsi yang lebih luas daripada penyelesaian sengketa teritorial karena juga menjadi instrumen koordinasi dalam menangani persoalan sosial dan pembangunan lintas batas. Pasted markdown

Tata kelola perbatasan juga bergantung pada kapasitas pemerintahan di tingkat lokal. Kajian Prabowo et al. (2022) di Pulau Sebatik menunjukkan pentingnya pengembangan kapasitas pemerintah daerah dalam pengelolaan kawasan perbatasan Indonesia–Malaysia. Hal tersebut memperlihatkan bahwa efektivitas kebijakan dan kesepakatan pada tingkat pusat membutuhkan kemampuan institusi daerah untuk menerjemahkannya ke dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan kawasan pada tingkat lokal.

Kondisi tersebut memperlihatkan pola tata kelola berlapis (multi-level governance). Pemerintah pusat berperan dalam hubungan diplomatik dan kebijakan keamanan, pemerintah daerah berhadapan langsung dengan persoalan pembangunan masyarakat perbatasan, sedangkan aparat keamanan dan instansi teknis menjalankan fungsi operasional di lapangan. Masyarakat perbatasan juga menjadi aktor penting karena mengalami secara langsung konsekuensi kebijakan kedua negara. Kerja sama Indonesia–Malaysia

karena itu dapat dipahami sebagai interaksi antarlembaga dan aktor pada berbagai tingkatan yang diarahkan untuk menjaga stabilitas sekaligus mendukung pembangunan kawasan.

Perkembangan Teknologi dalam Tata Kelola Perbatasan

Pemanfaatan teknologi menjadi salah satu instrumen yang dapat mendukung pengamanan wilayah perbatasan Kalimantan. Anwar (2021) menunjukkan bahwa penggunaan Unmanned Aerial Vehicle (UAV) dapat mendukung kegiatan pengintaian dan pengumpulan data pada wilayah perbatasan yang memiliki medan sulit dan keterbatasan akses. Teknologi tersebut memberikan peluang untuk memperluas jangkauan pengawasan, tetapi tidak dapat diposisikan sebagai pengganti kapasitas kelembagaan dan personel pengamanan. Efektivitas pemanfaatannya tetap membutuhkan integrasi dengan sistem koordinasi dan pengambilan keputusan.

Dalam perspektif tata kelola yang lebih luas, Suprpto dan Baderan (2026) menunjukkan bahwa transformasi digital dalam administrasi publik membutuhkan kebijakan adaptif, infrastruktur teknologi, manajemen perubahan, serta kolaborasi multipemangku kepentingan. Dengan demikian, penguatan teknologi dalam pengelolaan perbatasan Indonesia–Malaysia perlu dikembangkan secara terintegrasi dengan kesiapan kelembagaan, kapasitas sumber daya manusia, serta mekanisme pertukaran informasi antarlembaga.

Dalam konteks Indonesia–Malaysia, kebutuhan tersebut menjadi semakin penting karena pengelolaan perbatasan melibatkan berbagai institusi dengan kewenangan yang berbeda. Integrasi informasi antarlembaga berpotensi memperkuat koordinasi, tetapi efektivitasnya bergantung pada kesesuaian kebijakan, kapasitas sumber daya manusia, interoperabilitas sistem, dan komitmen kedua negara. Oleh karena itu, penggunaan UAV yang telah memperoleh dukungan empiris tidak dapat secara otomatis diperluas menjadi klaim bahwa kecerdasan buatan, cloud computing, atau radar jarak jauh telah diterapkan secara terintegrasi dalam kerja sama perbatasan Indonesia–Malaysia tanpa dukungan sumber yang memadai. Bagian teknologi pada naskah sebelumnya memang masih menempatkan teknologi terutama sebagai peluang pengembangan tata kelola.

Tantangan Implementasi dan Penguatan Kerja Sama

Meskipun berbagai mekanisme bilateral telah terbentuk, hasil kajian menunjukkan bahwa pengelolaan perbatasan Indonesia–Malaysia masih menghadapi tantangan implementasi. Karakter wilayah yang luas, perbedaan kewenangan antarlembaga, keberlanjutan koordinasi, dan kompleksitas persoalan sosial ekonomi menuntut mekanisme kerja sama yang mampu menghubungkan keputusan pada tingkat bilateral dengan pelaksanaan di tingkat lokal. Keberadaan forum kerja sama karena itu belum cukup apabila kesepakatan yang dihasilkan tidak diterjemahkan secara konsisten dalam program dan tindakan operasional.

Tantangan pengelolaan perbatasan juga berkaitan dengan mobilitas manusia dan pekerja migran. Anggita et al. (2024) menunjukkan bahwa penanganan buruh migran ilegal di Kalimantan Barat membutuhkan governance kooperatif karena persoalan tersebut melibatkan berbagai institusi dan memiliki implikasi terhadap ketahanan wilayah. Temuan tersebut memperkuat argumentasi bahwa pengelolaan perbatasan tidak dapat diserahkan kepada institusi keamanan semata, tetapi membutuhkan keterlibatan institusi ketenagakerjaan, imigrasi, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan lainnya.

Secara keseluruhan, hasil kajian memperlihatkan bahwa kerja sama Indonesia–Malaysia memiliki tiga dimensi utama yang saling berhubungan. Pertama, dimensi keamanan yang diwujudkan melalui patroli terkoordinasi dan koordinasi aparat kedua negara. Kedua, dimensi kelembagaan dan diplomasi yang dijalankan melalui GBC Malindo, diplomasi perbatasan, dan keterlibatan berbagai tingkatan pemerintahan. Ketiga, dimensi pembangunan sosial ekonomi yang dikembangkan melalui Sosek Malindo, penguatan kapasitas pemerintah daerah, dan keterlibatan masyarakat perbatasan. Teknologi berfungsi sebagai instrumen pendukung yang dapat memperkuat ketiga dimensi tersebut apabila diikuti kesiapan kelembagaan dan sumber daya manusia.

Dengan demikian, efektivitas pengelolaan perbatasan Indonesia–Malaysia tidak hanya ditentukan oleh intensitas pengamanan wilayah. Keberlanjutan kerja sama membutuhkan integrasi antara keamanan, diplomasi, kelembagaan, pembangunan sosial ekonomi, dan kapasitas teknologi. Pengelolaan perbatasan Kalimantan dengan demikian menunjukkan karakter tata kelola lintas negara yang multidimensional dan berlapis, dengan keberhasilan yang sangat

bergantung pada konsistensi implementasi kesepakatan, koordinasi antarlembaga, kapasitas pemerintah di tingkat lokal, serta kemampuan kedua negara menghubungkan agenda keamanan dengan kebutuhan pembangunan masyarakat perbatasan. Ini mempertahankan inti sintesis naskah Bapak, tetapi sekarang dukungan literturnya lebih merata.

PENUTUP

Kerja sama Indonesia dan Malaysia dalam pengelolaan wilayah perbatasan di Pulau Kalimantan menunjukkan pola tata kelola lintas negara yang bersifat multidimensional. Kerja sama tersebut tidak hanya berorientasi pada pengamanan wilayah, tetapi juga mencakup koordinasi kelembagaan, diplomasi perbatasan, serta pembangunan sosial ekonomi masyarakat. Pada dimensi keamanan, patroli terkoordinasi antara TNI dan TDM menjadi salah satu mekanisme dalam menghadapi berbagai ancaman keamanan lintas batas. Pada dimensi kelembagaan, GBC Malindo menjadi forum koordinasi bilateral yang menghubungkan berbagai institusi kedua negara, sedangkan Sosek Malindo memperluas orientasi kerja sama melalui agenda pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat perbatasan.

Pelaksanaan berbagai mekanisme kerja sama tersebut masih menghadapi tantangan yang berkaitan dengan karakter geografis kawasan, kompleksitas persoalan lintas batas, perbedaan kewenangan antarlembaga, serta kesinambungan koordinasi dalam menerjemahkan kesepakatan bilateral ke tingkat operasional. Perkembangan teknologi memberikan peluang untuk memperkuat tata kelola dan koordinasi perbatasan, tetapi pemanfaatannya membutuhkan kesiapan kelembagaan, kapasitas sumber daya manusia, kebijakan yang adaptif, dan kolaborasi antarpemangku kepentingan. Dengan demikian, keberlanjutan pengelolaan perbatasan Indonesia–Malaysia membutuhkan integrasi antara keamanan, koordinasi kelembagaan dan diplomasi, pembangunan sosial ekonomi, serta penguatan kapasitas tata kelola agar kawasan perbatasan tidak hanya berfungsi sebagai ruang perlindungan kedaulatan, tetapi juga sebagai ruang pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Penguatan kerja sama ke depan perlu diarahkan pada konsistensi implementasi kesepakatan bilateral melalui koordinasi yang lebih terintegrasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat keamanan, dan

lembaga teknis kedua negara. Mekanisme GBC Malindo dan Sosek Malindo perlu terus diperkuat agar menghasilkan program operasional yang memberikan manfaat nyata bagi keamanan dan kesejahteraan masyarakat perbatasan. Penguatan kapasitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi juga perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan kesiapan kelembagaan. Penelitian selanjutnya perlu memperluas kajian melalui wawancara, observasi, atau studi lapangan di kawasan perbatasan untuk memperoleh bukti empiris mengenai efektivitas kerja sama bilateral serta dampaknya terhadap keamanan dan pembangunan sosial ekonomi masyarakat perbatasan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. K., Anuar, A. R., & Hara, A. E. (2022). Contesting authority discourses in defining relations between Indonesia and Malaysia: A case study in the Kalimantan border areas. *Journal of International Studies*, 18, 191–217. <https://doi.org/10.32890/jis2022.18.7>
- Anandra, S. F., & Kusumawardhana, I. (2023). Tapal batas Sang Garuda: Pendekatan Indonesia dalam diplomasi dan konflik perbatasan dengan Malaysia. *TheJournalish: Social and Government*, 4(4), 413–432. <https://doi.org/10.55314/tsg.v4i4.686>
- Anggita, I., Suswanta, S., Listiani, E. I., & Ahdarrijal, Y. (2024). Governance kooperatif dalam penanganan buruh migran ilegal dan implikasinya terhadap ketahanan wilayah perbatasan di Kalimantan Barat. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 30(2), 204–221. <https://doi.org/10.22146/jkn.93705>
- Anuar, A. R., & Raharjo, S. N. I. (2022). Indonesia-Malaysia cross-border governance during the COVID-19 pandemic: Challenges and adaptation in the integration of the Tebedu-Entikong border region. *Journal of International Studies*, 18, 89–123. <https://doi.org/10.32890/jis2022.18.4>
- Anwar, S. (2021). Pemanfaatan pesawat terbang tanpa awak untuk pengamanan perbatasan Kalimantan dan dampaknya terhadap ketahanan wilayah. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 27(3), 289–308. <https://doi.org/10.22146/jkn.69622>
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Hariyatie, N. (2015). Kerjasama kawasan perbatasan dan pembangunan daerah Kalimantan (Border regional cooperation and regional development in Kalimantan). *Proyeksi: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora*, 20(2).
- Imbran, H., Baderan, U. S., & Lihawa, M. (2020). Strategi program pembangunan dalam pengentasan kemiskinan di Desa Karyamukti Kecamatan Mootilango Kabupaten Gorontalo. *JPPE: Jurnal Perencanaan & Pengembangan Ekonomi*, 3(2). <https://doi.org/10.31314/jppe.v3i2.925>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2020). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (4th ed.). SAGE Publications.
- Nidatya, N., Abdurrahman, M. K. G., & Saraswati, D. P. (2023). Indonesia's foreign policy: Suspends sending Indonesian migrant workers (PMI) to Malaysia after the establishment of the Online Maid System (SMO) by the Malaysian government. *JDKP: Jurnal Desentralisasi dan Kebijakan Publik*, 4(1), 99–111. <https://doi.org/10.30656/jdkp.v4i1.6363>
- Nusantoro, N., Runturambi, A. J. S., Kurniawan, H. F., & Mandira, I. M. C. (2022). Peran kepolisian dalam penindakan kejahatan lintas negara di kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia. *Journal Publicuho*, 5(4), 1139–1148. <https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i4.39>
- Prabowo, H., Indrayani, E., Rusfiana, Y., & Sinaga, O. (2022). Development of local government capacity in managing Indonesia-Malaysia border area (Study on Sebatik Island). *Croatian International Relations Review*, 28(90), 117–134. <https://doi.org/10.2478/CIRR-2022-0029>
- Purnama, A. B., & Iswardhana, M. R. (2022). Kalimantan border issues and Indonesia's border diplomacy towards Malaysia. *Natapraja*, 10(2), 105–124. <https://doi.org/10.21831/napapraja.v10i2.42347>
- Setiawan, E. (2025). Kerja sama bilateral Indonesia-Malaysia dalam pengamanan perbatasan melalui patroli terkoordinasi di Kalimantan Barat tahun 2023–2024. *Diplomacy and Global Security Journal: Jurnal Mahasiswa Magister Hubungan Internasional*, 2(2), 757–773. <https://doi.org/10.36859/dgsj.v2i2.4579>

Suprpto, S., & Baderan, U. S. (2026). Strategi digitalisasi administrasi publik untuk mewujudkan smart governance. Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik, 13(1), 407–414.
<https://doi.org/10.37606/publik.v13i1.217>.